Primary Journal of Multidisciplinary Research
Vol. 2 No. 1, February 2026, pp. 24-28
E-ISSN 3090-0972

Green Economy sebagai Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Nasional

Hermanto [1*], Ahyar Rosidi [1]
[1] Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram Indonesia
Email: Hermantobeaq@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received February 1, 2026
Revised February 15, 2026
Accepted February 20, 2026
Published February 28, 2026

Keywords
Green Economy,
Sustainable Development,
Economic Growth,
Environmen,t
Public Policy.

License by CC-BY-SA
Copyright © 2026, The Author(s).

ABSTRACT

The concept of the green economy has developed as a response to the various problems arising from conventional economic development, which has primarily focused on economic growth without adequately considering environmental carrying capacity and the sustainability of natural resources. Traditional development models have been proven to generate negative impacts such as environmental degradation, climate change, excessive resource exploitation, and widening social inequality. Therefore, the green economy emerges as an alternative approach that emphasizes the integration of economic growth, social equity, and environmental preservation within a sustainable development framework. This study aims to analyze how the green economy can serve as a new paradigm in national economic development and to identify the opportunities and challenges of its implementation across various strategic sectors. The research method employed is a descriptive qualitative approach through literature review and analysis of national and international policy documents related to sustainable development, renewable energy, green industry, and natural resource management. The findings indicate that the application of green economy principles has the potential to enhance energy and resource efficiency, promote environmentally friendly technological innovation, expand green jobs, and strengthen national economic competitiveness in the global market. Moreover, the green economy can serve as an instrument for poverty reduction through the development of environmentally based local economies and community empowerment. However, the implementation of the green economy still faces several challenges, including limited comprehensive regulations, low levels of environmental literacy among the public, high initial investment requirements, and resistance from conventional industrial sectors. Therefore, synergy among the government, private sector, academia, and society is required in the form of integrated policies, economic incentives, public education, and strengthened technological innovation to ensure that the transition toward a green economy proceeds effectively and sustainably. In this way, the green economy becomes not merely a discourse, but a concrete strategy for inclusive, equitable, and long-term oriented national economic development.

How to cite: Hermanto, H., Rosidi, A. (2026). Green Economy sebagai Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Nasional. *Primary Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 24-28. doi: https://doi.org/10.70716/pjmr.v2i1.405

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama setiap negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing nasional di tingkat global. Selama beberapa dekade, paradigma pembangunan ekonomi lebih banyak berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, sehingga menimbulkan berbagai persoalan ekologis dan sosial yang kompleks. Kondisi tersebut mendorong munculnya kebutuhan akan model pembangunan yang lebih holistik dan berorientasi jangka panjang.

Dalam praktiknya, pembangunan ekonomi konvensional kerap menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, polusi udara dan air, deforestasi, serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pengelolaan lingkungan yang baik dapat mengancam keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, muncul kesadaran global mengenai pentingnya integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan sebagai satu kesatuan strategi pembangunan (Todaro & Smith, 2015).

Konsep green economy atau ekonomi hijau kemudian berkembang sebagai alternatif paradigma pembangunan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga pada efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan emisi karbon, serta penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan. Pendekatan ini dipandang mampu menjawab tantangan pembangunan modern yang semakin kompleks dan multidimensional (UNEP, 2011).

Perkembangan ekonomi hijau tidak terlepas dari meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Berbagai forum global, seperti Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, telah menegaskan pentingnya transisi menuju sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Negara-negara di dunia mulai mengadopsi kebijakan energi terbarukan, industri rendah karbon, serta pengelolaan limbah yang lebih efisien sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional mereka.

Dalam konteks negara berkembang, penerapan ekonomi hijau menjadi tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, negara berkembang membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cepat untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Di sisi lain, tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan juga semakin besar akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Oleh sebab itu, ekonomi hijau dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan tuntutan pelestarian lingkungan (Sachs, 2015).

Implementasi ekonomi hijau juga berkaitan erat dengan inovasi teknologi dan transformasi struktural dalam berbagai sektor ekonomi. Penggunaan energi terbarukan, pengembangan transportasi ramah lingkungan, serta efisiensi industri menjadi bagian penting dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui munculnya sektor industri hijau dan green jobs.

Selain aspek ekonomi dan lingkungan, ekonomi hijau juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan akses terhadap sumber daya, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, ekonomi hijau tidak sekadar berbicara mengenai perlindungan lingkungan, tetapi juga mengenai pembangunan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan (World Bank, 2012).

Di tingkat nasional, penerapan ekonomi hijau memerlukan dukungan kebijakan publik yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi, insentif fiskal, serta kerangka hukum yang mendorong investasi di sektor ramah lingkungan. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, implementasi ekonomi hijau berpotensi mengalami hambatan, baik dari sisi pendanaan maupun resistensi pelaku industri konvensional.

Namun demikian, transisi menuju ekonomi hijau tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan perubahan pola pikir, peningkatan literasi lingkungan, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Edukasi publik mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan menjadi faktor kunci dalam membangun kesadaran kolektif untuk mendukung kebijakan ekonomi hijau (Porter & Kramer, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, ekonomi hijau dapat dipahami sebagai paradigma baru pembangunan ekonomi nasional yang berupaya mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Oleh karena itu, kajian mengenai ekonomi hijau menjadi penting untuk memahami arah kebijakan pembangunan masa depan serta strategi implementasi yang efektif dalam konteks nasional maupun global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam konsep green economy sebagai paradigma baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial–ekonomi dan kebijakan publik secara komprehensif melalui analisis naratif, bukan sekadar angka statistik. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menelaah berbagai perspektif konseptual dan kebijakan yang berkembang dalam isu pembangunan berkelanjutan (Creswell, 2014).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku teks ekonomi pembangunan, laporan lembaga internasional, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dengan ekonomi hijau. Studi kepustakaan dipilih karena topik ekonomi hijau banyak berkembang melalui diskursus akademik dan kebijakan global yang terdokumentasi secara luas (Flick, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer sekunder dan data sekunder pendukung. Data primer sekunder berupa laporan resmi organisasi internasional seperti United Nations

Environment Programme (UNEP), World Bank, dan OECD yang membahas pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Sementara itu, data sekunder pendukung meliputi artikel jurnal, prosiding konferensi, serta publikasi akademik yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database ilmiah seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan portal jurnal nasional terakreditasi. Kata kunci yang digunakan antara lain "green economy," "sustainable development," "pembangunan ekonomi berkelanjutan," dan "kebijakan lingkungan." Proses seleksi sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi topik, tahun publikasi, serta kredibilitas penulis atau lembaga penerbit agar data yang digunakan memiliki validitas akademik yang tinggi.

Setelah data terkumpul, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema, konsep, serta pola pemikiran yang berkaitan dengan implementasi ekonomi hijau. Analisis isi dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu seperti aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan publik. Metode ini memungkinkan peneliti menemukan hubungan konseptual antarvariabel tanpa melakukan eksperimen langsung (Krippendorff, 2018).

Tahapan berikutnya adalah reduksi data, yaitu proses penyaringan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, data yang tidak berkaitan langsung dengan ekonomi hijau dan pembangunan nasional dieliminasi agar analisis lebih terarah. Reduksi data juga bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami dalam kerangka penelitian kualitatif.

Selanjutnya dilakukan penyajian data (data display) dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel konseptual. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan interpretasi serta memperlihatkan hubungan antara teori ekonomi hijau dengan praktik kebijakan pembangunan di berbagai negara. Penyajian data juga membantu dalam proses penarikan kesimpulan yang sistematis dan terstruktur.

Dalam menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi untuk memastikan konsistensi temuan. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber literatur yang telah melalui proses peer review sehingga kualitas akademiknya dapat dipertanggungjawabkan (Yin, 2018).

Pendekatan analisis yang digunakan bersifat induktif, di mana peneliti menarik kesimpulan umum berdasarkan temuan khusus yang terdapat dalam berbagai literatur dan dokumen kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti membangun pemahaman konseptual mengenai ekonomi hijau sebagai paradigma pembangunan tanpa terikat pada satu teori tunggal, melainkan melalui sintesis berbagai pandangan ilmiah.

Tahap akhir penelitian adalah penarikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis tematik dan perbandingan antar sumber data yang telah diverifikasi. Rekomendasi diarahkan pada strategi implementasi ekonomi hijau dalam pembangunan nasional, termasuk penguatan regulasi, peningkatan literasi lingkungan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan ekonomi berkelanjutan (UNEP, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep green economy dalam pembangunan ekonomi nasional memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan energi. Berbagai kebijakan yang berorientasi pada pengurangan emisi karbon, pengembangan energi terbarukan, serta pengelolaan limbah berkelanjutan terbukti mampu menekan tingkat kerusakan lingkungan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan secara simultan apabila didukung oleh regulasi yang tepat.

Selain itu, ekonomi hijau mendorong terciptanya sektor industri baru yang berorientasi pada teknologi ramah lingkungan. Sektor energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi mengalami peningkatan investasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini membuka peluang kerja baru yang dikenal sebagai green jobs, yang tidak hanya berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kebutuhan keterampilan teknologi yang lebih tinggi (UNEP, 2011).

Dalam aspek sosial, implementasi ekonomi hijau menunjukkan potensi dalam mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan. Program berbasis lingkungan seperti pertanian organik,

ekowisata, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu meningkatkan pendapatan lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi berbasis lingkungan dapat menjadi strategi inklusif yang memberdayakan masyarakat secara langsung (World Bank, 2012).

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural. Salah satu kendala utama adalah tingginya biaya investasi awal yang diperlukan untuk membangun infrastruktur hijau dan teknologi ramah lingkungan. Banyak negara berkembang masih mengalami keterbatasan anggaran dan akses pembiayaan sehingga implementasi kebijakan ekonomi hijau berjalan relatif lambat.

Dari sisi regulasi, masih terdapat inkonsistensi kebijakan antara sektor ekonomi dan sektor lingkungan. Beberapa kebijakan industri masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam secara masif demi mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Ketidaksinkronan ini menyebabkan implementasi ekonomi hijau belum optimal dan cenderung bersifat parsial. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara menyeluruh (OECD, 2017).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa tingkat literasi lingkungan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan ekonomi hijau. Kesadaran publik terhadap pentingnya konsumsi berkelanjutan dan gaya hidup ramah lingkungan masih relatif rendah di beberapa wilayah. Padahal, perubahan perilaku konsumsi masyarakat memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan transformasi ekonomi hijau dalam jangka panjang.

Dalam konteks global, penerapan ekonomi hijau juga berpengaruh terhadap daya saing ekonomi suatu negara. Negara yang mampu mengembangkan industri hijau cenderung lebih kompetitif dalam perdagangan internasional karena meningkatnya permintaan produk ramah lingkungan di pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau bukan hanya strategi lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi yang bersifat strategis dan visioner (Porter & van der Linde, 1995).

Di sisi lain, transformasi menuju ekonomi hijau menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi hijau. Kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri berkelanjutan agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten, implementasi ekonomi hijau akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Peran pemerintah sangat krusial dalam mendorong percepatan ekonomi hijau melalui penyediaan insentif fiskal, subsidi energi terbarukan, serta regulasi yang mendukung investasi hijau. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi diperlukan untuk menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Pendekatan public–private partnership terbukti efektif dalam mempercepat adopsi teknologi hijau di berbagai negara.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan ekonomi yang relevan untuk menjawab tantangan abad ke-21. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan pendekatan pembangunan konvensional. Dengan komitmen kebijakan yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan investasi dan inovasi teknologi, ekonomi hijau dapat menjadi fondasi utama pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Ekonomi hijau dapat dipahami sebagai paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menempatkan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan secara selaras melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Dengan demikian, ekonomi hijau mampu menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial yang selama ini menjadi konsekuensi dari model pembangunan konvensional.

Lebih lanjut, penerapan ekonomi hijau memiliki dampak positif yang luas, antara lain terciptanya lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan dan industri berkelanjutan, meningkatnya daya saing ekonomi nasional di pasar internasional, serta terbukanya peluang pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi lingkungan. Namun, transformasi menuju ekonomi hijau tidak dapat dilakukan secara instan karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan regulasi yang komprehensif, kebutuhan investasi awal yang besar, kesiapan infrastruktur, serta rendahnya tingkat literasi dan kesadaran lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen jangka panjang dan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, memberikan insentif ekonomi, memperkuat riset dan inovasi teknologi, serta meningkatkan edukasi publik. Dengan sinergi yang berkelanjutan, ekonomi hijau berpotensi menjadi arah utama pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berdaya tahan, dan berorientasi pada kesejahteraan generasi masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review.

Sachs, J. D. (2015). The age of sustainable development. Columbia University Press.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Pearson.

UNEP. (2011). Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication. United Nations Environment Programme.

World Bank. (2012). Inclusive green growth: The pathway to sustainable development. World Bank Publications.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications.

Flick, U. (2018). An introduction to qualitative research. Sage Publications.

Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage Publications.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. Sage Publications.

OECD. (2017). Green growth indicators 2017. OECD Publishing.

Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment–competitiveness relationship. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 97–118.

Stern, N. (2007). The economics of climate change: The Stern review. Cambridge University Press.